



KETERANGAN KEPALA BAGIAN ORGANISASI

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANGLI TENTANG KELAS JABATAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI**



OLEH :

**KEPALA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANGLI
TAHUN 2025**

KETERANGAN KEPALA BAGIAN ORGANISASI

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANGLI TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahwa dalam rangka Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen sumber daya manusia, organisasi dituntut untuk memiliki sistem pengelolaan jabatan yang profesional, objektif, dan transparan. Salah satu instrumen penting dalam sistem tersebut adalah klasifikasi jabatan, yang dikenal dengan istilah kelas jabatan.

Kelas jabatan merupakan pengelompokan jabatan berdasarkan nilai atau bobot jabatan yang diperoleh melalui proses evaluasi yang sistematis, mencakup aspek tanggung jawab, risiko, kompleksitas tugas, serta kompetensi yang dibutuhkan. Dengan adanya kelas jabatan, organisasi dapat membangun struktur jabatan yang adil dan setara, serta mendukung pelaksanaan sistem penggajian dan penghargaan yang berbasis kinerja dan kontribusi nyata.

Seiring dengan tuntutan reformasi birokrasi dan dinamika dunia kerja, banyak organisasi menghadapi tantangan dalam menjaga keadilan internal dan eksternal dalam pengelolaan SDM. Ketimpangan dalam pengakuan terhadap peran dan kontribusi jabatan, serta ketidakjelasan dalam jalur karier, dapat menimbulkan masalah seperti rendahnya motivasi, tingginya turnover, hingga inefisiensi organisasi.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah proses sistematis yang digunakan untuk mengevaluasi, mengklasifikasikan, dan menyusun jabatan-jabatan dalam suatu organisasi ke dalam kelas atau tingkatan berdasarkan nilai relatif dari masing-masing jabatan. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan struktur jabatan yang adil, objektif, dan transparan, yang akan menjadi dasar dalam pengelolaan SDM, termasuk penggajian, promosi, dan pengembangan karier. agar relevan dengan dasar hukum yang berlaku saat ini.